**Politik Luar negeri Thailand**

*Created by: Rachmawati*

Thailand merupakan negara Monarki Konstitusional, yaitu kekuasaan Raja sebagai kepala negara dibatasi oleh UU. Sistem pemerintahan nya adalah Demokrasi Parlementer, Raja sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi namun merupakan pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Perdana Menteri dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. The prime minister of thailand sinks roots of his power into bureaucratic constituencies by means of parties (George McTurnan Kahin, 1962).

Sejak kudeta tahun 2006, militer kembali masuk ke politik Thailand dan memainkan perannya yang dominan. Sejak saat itu pula militer keluar dari kotak Parlemen dan PM, serta menjadi kekuatan sendiri. Dengan struktur seperti ini, Kerajaan dan Privy Council merupakan lembaga tertinggi di Thailand. Militer setingkat kedudukannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Perdana Menteri dan Kabinet Thailand, serta Peradilan dan Kehakiman. Masuknya kembali militer ke dalam politik Thailand pada dasarnya terjadi karena dua hal. Pertama, gagalnya sipil dalam menjaga stabilitas negara menjadi penyebab terjadinya kudeta militer tahun 2006. Militer kecewa terhadap pemerintah Thaksin yang sejak awal tahun 2006 dirundung permasalahan legitimasi kekuasaan akibat merebaknya kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan money politics dalam upaya memenangkan kursi perdana menteri lewat pembelian suara dalam pemilu tahun 2006.

Di samping itu, Posisi raja dalam Konstitusi Thailand adalah sebagai kepala. Raja bukan hanya sebagai Kepala Negara, tetapi juga dengan kekuasaan turun- temurunnya dianggap sebagai wakil Tuhan di Bumi dan simbol tertinggi kekuatan moral. Sebagai pemimpin tertinggi di Thailand, Raja Bhumibol Adulyadej adalah tempat terakhir dalam mengakhiri kebuntuan politik. Kebuntuan politik tahun 2006 yang berujung pada penggulingan Thaksin tentu juga karena adanya restu raja, yang ditandai dengan pendudukan kantor perdana menteri oleh pasukan Jenderal Sonthi. Raja disebut-sebut tidak suka dengan kepemimpinan Thaksin yang dianggap memimpin layaknya seorang pemimpin perusahaan. Ketidaksukaan terhadap Thaksin tidak hanya oleh Raja saja, tetapi juga dari sebagian kalangan militer terkait kebijakan Thaksin terhadap para separatis di Pattani, Yala, dan Narathiwat. Dalam upaya menyelesaikan konflik di provinsi di bagian selatan Thailand tersebut, Thaksin lebih memilih menggunakan pendekatan kekerasan, berbeda dengan himbauan raja yang menginginkan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan politik yang diinginkan Jenderal Sonthi.

Politik luar negeri negara Thailand:

1. Faktor historis

Thailand sebagai negara yang tidak pernah dijajah dan memiliki karakter bangsa yang asimilatif. Sifat ini membuat bangsa Thai mudah beradaptasi dan mudah mengadopsi nilai-nilai yang dianggap cocok dengan budayanya.

2. Aktor pembuat kebijakan

Pembuat kebijakan luar negerin diantaranya didominasi oleh birokrat petinggi kementrian luar negeri, militer, dan perdana menteri.

3. Output kebijakan luar negeri

Pada masa pasca perang dunia II Thailand memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat. Awal 1970an – saat ini: Terbagi dlm 2 periode:

a. Periode “Equidistance” diantara kekuatan dunia dan regional.

b. Periode “Omnidirectionality”, Thailand dengan PLN yang lebih independen. Dan setelah masa pemerintahan Thaksin politik luar negeri nya menjadi berubah arah dan lebih economic-oriented.